

LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE REVIEWED FROM FINANCIAL RATIOS AND INDEXES.

Nella Rahanratat^{1*}

¹Accounting Departement, YPUP Makassar College of Economics, Makassar.

Abstract.

This research aims to analyze the financial performance of the Ambon City regional government in terms of financial ratios in implementing regional autonomy. This research is a descriptive qualitative research type. Using documentation study data collection techniques or by tracing which is done by collecting secondary data, namely regional government financial report data for 2012 - 2015 from related agencies. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique to assess financial performance, namely the regional independence ratio, effectiveness ratio, regional financial activity/harmony ratio and regional financial growth ratio, assessing financial capability using the degree of fiscal autonomy ratio and routine capability index. The research results found that the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) of Ambon City during the three year observation period from 2013 to 2015 was on a scale of 0% - 25%, which means it was classified as "poor". Regional Financial Activity/Harmony Ratio (RAKD) for Direct Expenditures (BL) and Indirect Expenditures (BTL) in Ambon City, where during the observation period Indirect Expenditures (BTL) had a large portion compared to Direct Expenditures. The amount of indirect expenditure has reached more than 65%, which means that the Ambon City Government spends more on personnel expenditure than on public services. Growth ratio, it is known that of the four elements of the APBD, namely PAD, TPD, Indirect Expenditure and Direct Expenditure, the Ambon City government was only able to maintain good PAD growth during the observation period from 2013 to 2015, the rest of the growth rate still needs to be improved. The DOF ratio of Ambon City during the three year observation period from 2013 to 2015 was "very poor", below 10%, and that means that the Ambon City Government has very poor ability to finance government activities. The Routine Capacity Index (IKR) for the three year observation period from 2013 to 2015 shows that the ability of the Ambon City government to spend routine expenditures with local original income is still "deficient", namely less than 20% or in other words more than 80% of the City's routine expenditures. Ambon is covered by funds from the center.

Keywords. Autonomous Regional Finance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, Financial Growth Ratio, Routine Capability Index, Degree Of Fiscal Autonomy Ratio.

*Corresponding Author : rahanratatnella@gmail.com

INTRODUCTION

Di era otonomi daerah ini setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana daerah adalah sebagai wujud penggunaan dana publik sangat dituntut dari pemerintah daerah. Oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah sangat dituntut untuk dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah dan menggunakan sumber – sumber pendapatan daerah tersebut dengan efisien dan efektif.

Kebijakan otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk regulasi bukanlah suatu kebijakan publik yang dapat memberikan jaminan bahwa akan adanya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah dan tingkat desentralisasi fiskal serta adanya penghematan dalam belanja jika regulasi tersebut tidak secara ketat dan tegas mengatur tentang pengelolaan keuangan.

Menurut (Andriyan et al., 2023a) dalam melaksanakan otonomi daerah, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah (Sijabat et al., 2014).

Menurut (Andriyan, 2021) dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah self supporting di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya (Hastuti, 2018).

Menurut (Melmambessy, 2022) kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (Poyoh et al., 2017).

Indikator kinerja keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Sari et al., 2021).

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan (Andriyan et al., 2022), pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Indikator dari kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio derajat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon ditinjau dari rasio keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

LITERATURE REVIEW

Otonomi

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (Bosso et al., 2021). Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2004). (Andriyan et al., 2023b) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian, pertama, Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kedua, Wewenang untuk mengatur daerah sendiri. Ketiga, Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam (Indonesia, 2003). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Elden Palyama et al., 2023). Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah; Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan (Kusmiadi et al., 2021; Rumulus et al., 2023).

Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Difinubun & Gudono, 2021; Wulandary et al., 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan (Difinubun et al., 2023), analisis kinerja keuangan dapat di ketahui dengan menggunakan rasio keuangan. Penggunaan rasio keuangan sendiri harus di sesuaikan dengan data APBD. Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan rasio sebagai berikut:

1) RasioKemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007:61). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$RKKD = \frac{TotalPenerimaanPAD}{TotalBantuanDaerahdanPinjaman} \times 100\%$$

Selanjutnya kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan tinggi jika nilai rasio kemandiriannya 75-100 persen, sedang jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen sampai dengan 75 persen, rendah jika nilai rasio lebih dari 25 persen sampai dengan 50 persen, dan kurang jika nilai rasio lebih dari 0 sampai dengan 25 persen.

2) Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah

Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja oprasional pemerintah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Resky Iskandar et al., 2023).

$$BelanjaLangsung = \frac{TotalBelanjaLangsung}{TotalAPBD} \times 100\%$$

$$BelanjaTidakLangsung = \frac{TotalBelanjaTidakLangsung}{TotalAPBD} \times 100\%$$

Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio aktivitas pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio aktivitas pemerintah kabupaten/kota, pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian. Menurut (Rini et al., 2022) secara teoritis dibandingkan pengeluaran belanja tidak langsung, pengeluaran belanja langsung mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja langsung mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Didalam litelatur-litelatur, implementasinya pengeluaran belanja langsung ini disamakan dengan investasi pemerintah yang

bersifat *social investment* yang mempunyai kecenderungan berbentuk *Aoutonomus Investment*.

3) Rasio Pertumbuhan(*Growth Ratio*)

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2008:241).

$$PertumbuhanPAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Pengukuran Tingkat Pendapatan Daerah (TPD) dapat dihitung menggunakan rumus (Rudiyanto, 2015:48):

$$PertumbuhanTPD = \frac{TPD_t - TPD_{t-1}}{TPD_{t-1}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) daerah dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut (Rudiyanto, 2015:48):

$$Pertumbuhan\ Belanja\ Langsung = \frac{BL_t - BL_{t-1}}{BL_{t-1}} \times 100\%$$

$$Pertumbuhan\ Belanja\ TL = \frac{BTL_t - BTL_{t-1}}{BTL_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Tahun berjalan

t-1 = Tahun sebelumnya

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-t dan data anggaran/realisasi tahun ke t-1 dikali 100%. Semakin tinggi perhitungan tersebut maka pertumbuhan APBD semakin baik apabila semakin rendah perhitungan tersebut maka dapat dikatakan kurang.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Menurut (Sismar et al., 2023) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Mengukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut (Pereira & Hanggari Citra Rini, 2022) DOF dapat diukur dengan menghitung:

1) Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) merupakan suatu perhitungan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sementara, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan di awal bab ini tentang keuangan daerah dan otonomi daerah.

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kriteria derajat otonomi fiskal dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio derajat otonomi fiskal diatas 50 persen, baik jika nilai derajat otonomi fiskal lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal 0 persen sampai dengan 10 persen.

2) Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya.

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Rasio IKR dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio IKR diatas 50 persen, baik jika nilai IKR lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio IKR lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio IKR lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio IKR lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio IKR 0 persen sampai dengan 10 persen.

METHOD, DATA AND ANALYSIS

Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif deskriptif. Menggunakan Teknik pengupulan data studi dokumentasi atau dengan cara menelusuri yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 - 2015 dari dinas terkait. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik analasisi deskriptif untuk menilai kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio aktivitas/keserasian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah, menilai kemampuan keuangan menggunakan rasio derajat otonomi fiskal dan indeks kemampuan rutin. peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai kinerja pemerintah daerah.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kota Ambon

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	PAD (Rp)	Total Bantuan Daerah & Pinjaman (Rp)	RKKD
2013	72.674.518.644	637.113.199.416	0.114
2014	78.810.828.205	821.698.930.616	0.096
2015	99.196.412.743	708.178.623.264	0.140

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon adalah 0,114 atau 11,4% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,096 atau 9,6% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,140 atau 14%.

Tabel 2. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Tahun 2013 – 2015

Tahun	RKKD	Indikator	Kriteria
2013	11,4%	0% – 25%	Kurang
2014	9,6%	0% – 25%	Kurang
2015	14,0%	0% – 25%	Kurang

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.2 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berada pada skala 0% – 25% yang artinya tergolong pada kriteria “kurang”. Dengan kata lain bahwa selama periode pengamatan, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Ambon kurang. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah Kota Ambon belum mampu memaksimalkan potensi PAD, sehingga pendapatan Kota Ambon lebih dari 75% masih merupakan dana bantuan dan pinjaman.

2. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (RAKD)

Tabel 3. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (RAKD)
Belanja Langsung Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	Tot. Belanja Langsung (Rp)	Tot. APBD (Rp)	RAKD – BL
2013	189.826.163.683	697.480.133.520	0.272
2014	273.240.329.507	907.658.862.907	0.301
2015	317.613.744.520	1.024.645.252.229	0.310

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk belanja langsung Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2013, nilai Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk belanja langsung Kota Ambon adalah 0,272 atau 27,2% kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,301 atau 30,1% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RAKD – BL kembali mengalami peningkatan menjadi 0,310 atau 31%.

Tabel 4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (RAKD)
Belanja Tidak Langsung Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	Tot. Belanja Tidak Langsung (Rp)	Tot. APBD (Rp)	RAKD – BTL
2013	507.653.968.837	697.480.133.520	0.728
2014	634.418.533.400	907.658.862.907	0.699
2015	707.031.507.709	1.024.645.252.229	0.690

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.4 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk belanja tidak langsung Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami trend penurunan. Pada tahun 2013, nilai Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk belanja tidak langsung Kota Ambon adalah 0,728 atau 72,8% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,699 atau 69,9% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RAKD – BTL kembali mengalami peningkatan menjadi 0,690 atau 69%.

Tabel 5. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (RAKD)
Tahun 2013 – 2015

Tahun	RAKD – Belanja Langsung (BL)	RAKD – Belanja Tidak Langsung (BTL)	Perbandingan
2013	27,2%	72,8%	BL < BTL
2014	30,1%	69,9%	BL < BTL
2015	31,0%	69,0%	BL < BTL

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.5 di atas diketahui perbandingan Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Kota Ambon, di mana selama periode pengamatan Belanja Tidak Langsung (BTL) memiliki porsi yang besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Besaran Belanja Tidak Langsung menembus lebih dari 65% yang artinya Pemerintah Kota Ambon menghabiskan Belanja lebih banyak untuk belanja pegawai dari pada pelayanan publik.

3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)

Berikut akan disajikan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) Kota Ambon dilihat dari pertumbuhan PAD, pertumbuhan

Tingkat Pendapatan Daerah (TPD), pertumbuhan Belanja Langsung dan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung.

a) Pertumbuhan PAD

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)
Pertumbuhan PAD Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	PAD (Rp)	PADt - PADt-1 (Rp)	Pertumbuhan PAD
2012	63.517.156.031		
2013	72.674.518.644	9.157.362.613	0.126
2014	78.810.828.205	6.136.309.561	0.078
2015	99.196.412.743	20.385.584.538	0.206

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan PAD Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk Pertumbuhan PAD Kota Ambon adalah 0,126 atau 12,6%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,078 atau 7,8% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RPKD – Pertumbuhan PAD mengalami peningkatan menjadi 0,206 atau 20,6%.

b) Pertumbuhan Tingkat Pendapatan Daerah (TPD)

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)
Pertumbuhan TPD Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	TPD (Rp)	TPDt - TPDt-1 (Rp)	Pertumbuhan TPD
2012	726.183.481.186		
2013	826.393.969.260	100.210.488.074	0.121
2014	900.509.758.821	74.115.789.561	0.082
2015	1.007.282.959.996	106.773.201.175	0.106

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel 4.7 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan TPD Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan TPD Kota Ambon adalah 0,121 atau 12,1% kemudian mengalami penurunan menjadi 0,082 atau 8,2% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RPKD – pertumbuhan TPD mengalami peningkatan menjadi 0,106 atau 10,6%.

c) Pertumbuhan Belanja Langsung

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)
Pertumbuhan Belanja Langsung Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	BLt - BLt-1 (Rp)	Pertumbuhan BL
2012	189.826.163.683		
2013	220.716.712.480	30.890.548.797	0.140
2014	273.240.329.507	52.523.617.027	0.192
2015	317.613.744.520	44.373.415.013	0.140

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan Belanja Langsung Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan Belanja Langsung Kota Ambon adalah 0,140 atau 14% kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,192 atau 19,2% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RPKD – BL mengalami penurunan menjadi 0,140 atau 14%.

d) Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Ambon
Tahun 2013 – 2015

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	BTLt - BTLt-1 (Rp)	Pertumbuhan BTL
2012	507.653.968.837		
2013	609.847.234.946	102.193.266.109	0.168
2014	634.418.533.400	24.571.298.454	0.039
2015	707.031.507.709	72.612.974.309	0.103

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.9 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) untuk pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Ambon adalah 0,168 atau 16,8%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,039 atau 39% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai RPKD – BTL mengalami peningkatan menjadi 0,103 atau 10,3%.

Tabel 10. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD)
Tahun 2013 – 2015

Tahun	PAD	TPD	BL	BTL
2013	12,6%	12,1%	14,0%	16,8%
2014	7,8%	8,2%	19,2%	3,9%
2015	20,6%	10,6%	14,0%	10,3%

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Untuk Pertumbuhan PAD, dapat dinyatakan “baik”, karena mengalami peningkatan pada tahun 2015, akhir periode pengamatan, yakni sebesar 20,6%. Meski pada tahun 2014 sempat menurun menjadi 7,8% dari 12,6% pada tahun 2013.

Perkembangan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon selama Tahun 2013 – 2015

1) Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Tabel 11. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon
Tahun 2013 – 2015

Tahun	PAD (Rp)	Tot. Pendapatan Daerah (Rp)	DOF
2013	72.674.518.644	826.393.969.260	0.088
2014	78.810.828.205	900.509.758.821	0.088
2015	99.196.412.743	1.007.282.959.996	0.098

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.11 di atas diketahui bahwa nilai Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2013, nilai Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon adalah 0,088 atau 8,8% dan nilai tersebut tetap bertahan tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai Rasio DOF mengalami peningkatan menjadi 0,098 atau 9,8%.

Tabel 12. Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Rasio Derajat Otonomi Fiskal Tahun 2013 – 2015

Tahun	DOF	Indikator	Kriteria
2013	8,8%	0% – 10%	Sangat Kurang
2014	8,8%	0% – 10%	Sangat Kurang
2015	9,8%	0% – 10%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.12 di atas diketahui bahwa penilaian kemampuan keuangan daerah Kota Ambon berdasarkan pada Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan, tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Diketahui bahwa rasio DOF Kota Ambon adalah “sangat kurang”, dibawah 10%, dan itu berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Hal ini

jelas disebabkan oleh kurangnya upaya pemerintah Kota Ambon untuk menggali sumber pembiayaan, yakni penerimaan atau pendapatan asli daerah.

2) Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Tabel 13. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
Kota Ambon Tahun 2013 – 2015

Tahun	PAD (Rp)	Tot. Belanja Rutin (Rp)	IKR
2013	72.674.518.644	507.653.968.837	0.143
2014	78.810.828.205	634.418.533.400	0.124
2015	99.196.412.743	707.031.507.709	0.140

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.13 di atas diketahui bahwa nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Ambon adalah 0,143 atau 14,3% dan nilai mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,124 atau 12,4%. Pada tahun 2015 nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) mengalami peningkatan menjadi 0,140 atau 14%.

Tabel 14. Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
Tahun 2013 – 2015

Tahun	IKR		Indikator	Kriteria
2013	14,3%		10% – 20%	Kurang
2014	12,4%		10% – 20%	Kurang
2015	14,0%		10% – 20%	Kurang

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari tabel 4.14 di atas diketahui kemampuan keuangan daerah Kota Ambon berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan penilaian kinerja diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kota Ambon membelanjakan pembelanjaan rutin dengan pendapatan asli daerah masih “kurang” yaitu kurang dari 20% atau dengan kata lain lebih dari 80% pembelanjaan rutin Kota Ambon ditalangi oleh dana dari pusat.

Discussion

Rekapitulasi Hasil Analisis Rasio Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon selama Tahun 2013 – 2015

Berikut akan disajikan rekapitulasi hasil perhitungan analisis rasio kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kota Ambon selama tahun 2013 – 2015 yang diteliti dalam penelitian.

Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Analisis Rasio Kinerja
dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon
selama Tahun 2013 – 2015

Rasio	2013		2014		2015	
	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria
RKKD	11,4%	Kurang	9,6%	Kurang	14,0%	Kurang
RAKD – BL	27,2%	BL<BTL	30,1%	BL<BTL	31,0%	BL<BTL
RAKD – BTL	72,8%	BL<BTL	69,9%	BL<BTL	69,0%	BL<BTL
RPKD – PAD	12,6%	-	7,8%	Turun	20,6%	Naik
RPKD – TPD	12,1%	-	8,2%	Turun	10,6%	Naik
RPKD – BL	14,0%	-	19,2%	Naik	14,0%	Turun
RPKD – BTL	16%	-	3,9%	Turun	10,3%	Naik
Rasio DOF	8,8%	Sangat Kurang	8,8%	Sangat Kurang	9,8%	Sangat Kurang
IKR	14,3%	Kurang	12,4%	Kurang	14,0%	Kurang

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Keterangan:

- RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- RAKD – BL : Rasio Aktivitas Keuangan Daerah – Belanja Langsung
- RAKD – BTL : Rasio Aktivitas Keuangan Daerah – Belanja Tidak Langsung
- RPKD – PAD : Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah – Pendapatan Asli Daerah
- RPKD – TPD : Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah – Total Pendapatan Daerah
- RPKD – BL : Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah – Belanja Langsung
- RPKD – BTL : Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah – Belanja Tidak Langsung
- Rasio DOF : Rasio Derajat Otonomi Fiskal
- IKR : Indeks Kemampuan Rutin

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon ditinjau Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terlihat bahwa Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan tinggi jika nilai rasio kemandiriannya 75-100 persen, sedang jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen sampai dengan 75 persen, rendah jika nilai rasio lebih dari 25 persen sampai dengan 50 persen, dan kurang jika nilai rasio lebih dari 0 sampai dengan 25 persen. Sebagaimana kita tahu bahwa kemandirian keuangan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah (Mahmudi, 2007:61). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berada pada skala 0% – 25% yang artinya tergolong pada kriteria “kurang”. Dengan kata lain bahwa selama periode pengamatan, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Ambon kurang. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah Kota Ambon belum mampu memaksimalkan potensi PAD, sehingga pendapatan Kota Ambon lebih dari 75% masih merupakan dana bantuan dan pinjaman.

Ditinjau dari Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berada pada skala 0% – 25% yang artinya tergolong pada kriteria “kurang”. Dengan kata lain bahwa selama periode pengamatan, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Ambon kurang. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah Kota Ambon belum mampu memaksimalkan potensi PAD, sehingga pendapatan Kota Ambon lebih dari 75% masih merupakan dana bantuan dan pinjaman. Belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio aktivitas pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio aktivitas pemerintah kabupaten/kota, pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian. Menurut Rahmiyati (2008) dalam Rudyanto (2015:47), secara teoritis dibandingkan pengeluaran belanja tidak langsung, pengeluaran belanja langsung mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja langsung mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Didalam literatur-literatur, implementasinya pengeluaran belanja langsung ini disamakan dengan investasi pemerintah yang bersifat *social investment* yang mempunyai kecenderungan berbentuk *Autonomous Investment*.

Ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah (RPKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Untuk Pertumbuhan PAD, dapat dinyatakan “baik”, karena mengalami peningkatan pada tahun 2015, akhir periode pengamatan, yakni sebesar 20,6%. Meski pada tahun 2014 sempat menurun menjadi 7,8% dari 12,6% pada tahun 2013. Sementara itu untuk pertumbuhan Tingkat Pendapatan Daerah (TPD) dapat dikatakan “kurang baik”, meski terjadi peningkatan pada akhir periode pengamatan tahun 2015 menjadi 10,6% dari 8,2% pada tahun 2014 namun pada tahun 2013 nilai pertumbuhan TPD adalah 12,1%. Dan nilai pertumbuhan TPD Kota Ambon pada tahun 2013 lebih besar daripada tahun 2015. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (BTL) mengalami kondisi yang sama dengan Pertumbuhan TPD, di mana pada awal tahun periode pengamatan, tahun 2013, nilai pertumbuhan BTL adalah 16,8%. Nilai tersebut mengalami

penurunan pada tahun berikutnya, yakni tahun 2014, menjadi 3,9%. Meski pada tahun 2015, akhir periode pengamatan, nilai pertumbuhan BTL meningkat menjadi 10,3%, namun nilai tersebut lebih kecil daripada nilai pertumbuhan BTL pada tahun 2013. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pertumbuhan BTL Kota Ambon masih “kurang baik”. Begitupun pada pertumbuhan Belanja Langsung (BL) yang dapat dikatakan “kurang baik”. Meski sempat meningkatkan pada tahun 2014 menjadi 19,2%, namun kembali menurun menjadi 14,0% pada tahun 2015. Dari keempat unsur APBD, yakni PAD, TPD, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, pemerintah Kota Ambon hanya mampu mempertahankan dengan baik pertumbuhan PAD selama periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, selebihnya masih perlu diperbaiki tingkat pertumbuhannya. Ditinjau dari Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2013, nilai Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Ambon adalah 0,088 atau 8,8% dan nilai tersebut tetap bertahan tahun 2014. Pada tahun 2015 nilai Rasio DOF mengalami peningkatan menjadi 0,098 atau 9,8%. Kriteria Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio derajat otonomi fiskal diatas 50 persen, baik jika nilai derajat otonomi fiskal lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal 0 persen sampai dengan 10 persen (Abdul Halim, 2004). Sementara berdasarkan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan penilaian kinerja diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kota Ambon membelanjakan pembelanjaan rutin dengan pendapatan asli daerah masih “kurang” yaitu kurang dari 20% atau dengan kata lain lebih dari 80% pembelanjaan rutin Kota Ambon ditalangi oleh dana dari pusat.

CONCLUSION DAN SUGGESTION

Conclusion

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 berada pada skala 0% – 25% yang artinya tergolong pada kriteria “kurang”. Dengan kata lain bahwa selama periode pengamatan, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Ambon kurang. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah Kota Ambon belum mampu memaksimalkan potensi PAD, sehingga pendapatan Kota Ambon lebih dari 75% masih merupakan dana bantuan dan pinjaman.
2. Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Daerah (RAKD) untuk Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Kota

Ambon, di mana selama periode pengamatan Belanja Tidak Langsung (BTL) memiliki porsi yang besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Besaran Belanja Tidak Langsung menembus lebih dari 65% yang artinya Pemerintah Kota Ambon menghabiskan Belanja lebih banyak untuk belanja pegawai dari pada pelayanan publik.

3. Berdasarkan penilai rasio pertumbuhan, diketahui bahwa dari keempat unsur APBD, yakni PAD, TPD, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, pemerintah Kota Ambon hanya mampu mempertahankan dengan baik pertumbuhan PAD selama periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, selebihnya masih perlu diperbaiki tingkat pertumbuhannya.
4. Diketahui bahwa rasio DOF Kota Ambon selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah “sangat kurang”, dibawah 10%, dan itu berarti bahwa Pemerintah Kota Ambon memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Hal ini jelas disebabkan oleh kurangnya upaya pemerintah Kota Ambon untuk menggali sumber pembiayaan, yakni penerimaan atau pendapatan asli daerah.
5. Berdasarkan penilaian kinerja Indeks Kemampuan Rutin (IKR) selama tiga tahun periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 diketahui bahwa kemampuan pemerintah Kota Ambon membelanjakan pembelanjaan rutin dengan pendapatan asli daerah masih “kurang” yaitu kurang dari 20% atau dengan kata lain lebih dari 80% pembelanjaan rutin Kota Ambon ditalangi oleh dana dari pusat.

Suggestion.

1. Berdasarkan perhitungan beberapa rasio dalam penelitian ini diketahui bahwa kinerja dan kemampuan keuangan daerah masih pada kriteria “kurang” dan “sangat kurang”, jadi disarankan agar pemerintah daerah Kota Ambon belum maksimal dalam menggali sumber penerimaan atau pendapatan asli daerah.
2. Berdasarkan perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung diketahui bahwa Belanja Tidak Langsung memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal ini berarti bahwa dari total pendapatan Kota Ambon lebih banyak dihabiskan untuk belanja rutin ketimbang belanja untuk pelayanan publik. Saran yang dapat diberikan untuk hal ini adalah pemerintah Kota Ambon harus melakukan perimbangan dalam hal pembelanjaan.

REFERENCE

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan(Jpk)*,3(1),47–54.
<https://doi.org/10.18196/Jpk.V3i1.12847>

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Dfinubun, Y., & Hidayat, H. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jsip: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17–24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023a). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1–1–18.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023b). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1–18.
- Bosso, E., Diana, F., & Asirah, A. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Luwu Utara. *Patria Artha Journal Of Accounting And Financial Reporting*, 93–104.
- Dfinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–80.
- Dfinubun, Y., Khaerani, A., & Fajar, U. (2023). Financial Statements Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Elden Palyama, F., Andriyan, Y., Ery Kusmiadi, M., & Pemerintahan, I. (2023). Evaluasi Pelayanan Asn Terhadap Tugas Pokok Pegawai Di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 27–35.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Symposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784–799.
- Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang. *Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. *Pemerintahan Daerah*.
- Kusmiadi, M. E., Yulia Wiellys Sutikno, A., & Azis, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Bima). *Equality Before The Law*, 95–110.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Pereira, L., & Hanggari Citra Rini, T. (2022). Pengaruh Lingkungan Eksternal Dan Lingkungan Internal Terhadap Kinerja Ukm Melalui Keunggulan Bersaing Pada Ukm Di Kota Sorong. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(3), 162–169.

- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Resky Iskandar, M., Nasir, N., Sismar, A., & Difinubun, Y. (2023). Kinerja Keuangan Perusahaan: Telaah Rasio Keuangan (Studi Pada Pt. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros). *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 22–27.
- Rini, T. H. C., Khaerani, A., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Bumn Di Kota Sorong. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 57–69.
- Rumlus, M. H., Yulia Wiellys Sutikno, A., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2023). The Urgency Of Policies To Combat Violence Against Domestic Workers. *International Journal Of Social Science And Human Research*, 6(8), 4819–4825. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/V6-l8-29>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas*, 4(1), 408–425.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(2), 236–242.
- Sismar, A., Rosida Salsabila, A., & Ahbal Bil Haq, M. (2023). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat Pada Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong. *Remb: Researh Economics Management And Business*, 1(1), 1–10.
- Wulandary, A., Hanggari Citra Rini, T., & Khaerani, A. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 45–57.